



Laporan Kinerja

**TRIWULAN I
TAHUN 2024**

STASIUN KIPM SORONG



**#2024
KKP BEYOND**



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan LAPORAN KINERJA (LKj) Tahunan kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Permen KP 35 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan perikanan serta Peraturan

Kepala Badan KIPM Nomor : 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan BKIPM.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 . LKj merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun KIPM Sorong.



Sorong, Maret 2024
Kepala,

NIKMATUL ROCHMAH

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 PROFIL ORGANISASI	3
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 CAPAIAN KINERJA	11
2.2 ANALISA DAN EVALUASI	14
2.3 REALISASI ANGGARAN	17
BAB III PENUTUP	36

Tabel 1.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024	17
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja 1 : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	19
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja 2 : Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya	20
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja 3 : Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability	21
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja 4 : Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	22
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja 5 : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	23
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja 6 : Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	25
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja 7 : UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control)	26
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja 8 : Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi .	27
Tabel 2.10	Capaian Indikator Kinerja 9 : enerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	28
Tabel 2.11	Capaian Indikator Kinerja 10 : Indeks Profesionalitas ASN	29
Tabel 2.12	Capaian Indikator Kinerja 11 : Penilaian Mandiri SAKIP	30
Tabel 2.13	Capaian Indikator Kinerja 12 : Persentase Penyelesaian Temuan BPK	32
Tabel.2.14	Capaian Indikator Kinerja 13 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP	33
Tabel.2.15	Capaian Indikator Kinerja 14 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	34
Tabel.2.16	Capaian Indikator Kinerja 15 : Nilai Kinerja Anggaran	35
Tabel.2.17	Capaian Indikator Kinerja 16 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa	36
Tabel.2.18	Capaian Indikator Kinerja 17 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong	3
Gambar 1.2	Peta Sasaran Strategis SKIPM Sorong Tahun 2024	4
Gambar 2.1.	Status Indeks Capaian IKU	8
Gambar 2.2	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan pada Aplikasi Kinerja KKP Tahun 2024.....	9
Gambar 2.3	Dashboard Persentase Temuan Itjen KKP pada Aplikasi SIDAK KKP Tahun 2024	26
Gambar 2.4	Dashboard IKPA Satker Stasiun KIPM Sorong untuk periode s/d Maret 2024 pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu	27
Gambar 2.5	Presentasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	30

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 110,06%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 17 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 6 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, 11 IKU yang belum ada pencapaian karena pengukurannya dilakukan secara semesteran dan/atau tahunan
- B. Uraian 6 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor;
 2. Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya;
 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI
 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control)
 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
- C. Uraian 11 IKU yang belum ada capaian, yaitu:
 1. Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability
 2. Penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
 3. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 4. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 5. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 6. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 7. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 9. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 10. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong
 11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong



Realisasi Kinerja Keuangan Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2023 mencapai 968,253,140,- atau 20,51% dari pagu anggaran Stasiun KIPM Sorong (T.A) 2024 sebesar Rp. 4.721.053.000,-Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang semula Rp. 6,852,217,000,- kemudian mengalami pengurangan anggaran untuk pengalihan ke BKI sebesar Rp. 2.131.164.000,-. Saat ini terdapat anggaran yang mengalami blokir sebesar Rp. 227,500,000,-

Sehingga total pagu BKIPM Tahun 2023 setelah blokir sejumlah Rp. 4.493.553.000 .

Pagu anggaran Stasiun KIPM Sorong tersebut dilaksanakan melalui program Pengendalian Mutu, Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dan Dukungan Manajemen.

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Sorong dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Sorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Sorong serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Sorong.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

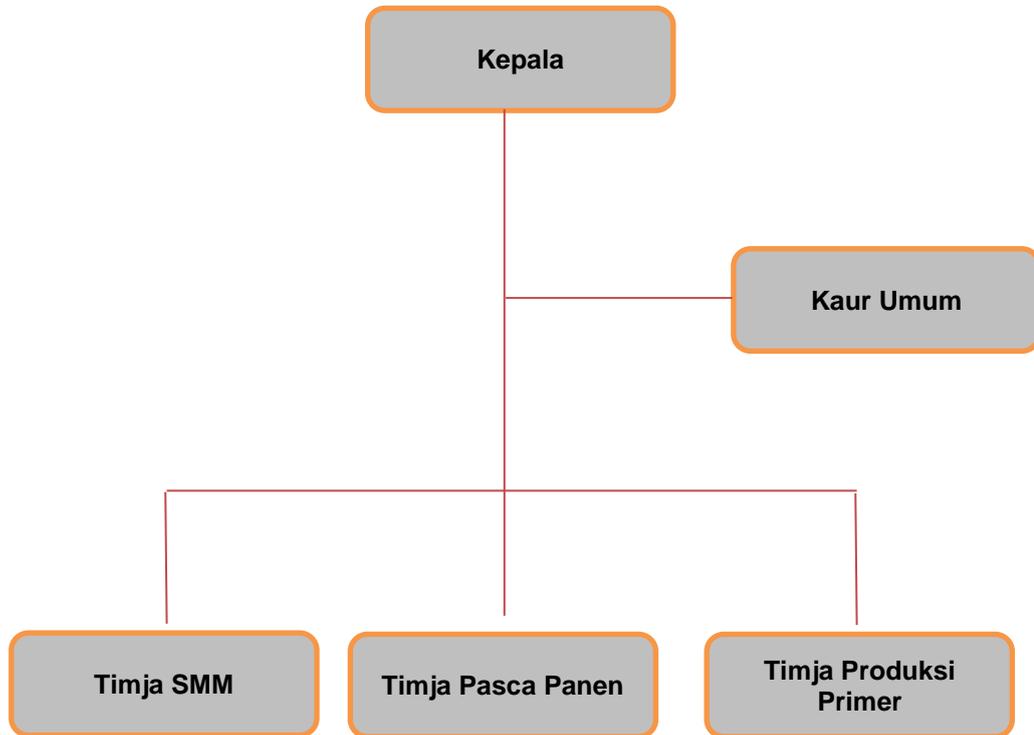
1.2. Profil Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Sorong adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Namun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, tugas/kewenangan kekarantinaan yang sebelumnya dilaksanakan di Stasiun KIPM Sorong beralih ke Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan telah terbentuk Unit Eselon I Badan Pengendalian Mutu dan Pengawasan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tugas dan fungsi Unit Eselon I ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan di lingkungan KKP. Stasiun KIPM Sorong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan tugas pelaksanaan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui fungsi a) Pelaksanaan inspeksi, surveilen, monitoring dan evaluasi UPI dalam rangka sertifikasi PMMT, b) Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya; c) Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan; d) Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan Lembaga Inspeksi; e) Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Stasiun KIPM Sorong dalam menjalankan tugasnya, memiliki pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 11 (sebelas) orang pegawai, yang terdiri dari 1 Kepala UPT, 3 Pegawai administrasi dan 7 Tenaga Fungsional Inspektur Mutu /Asiten Inspektur Mutu. Selain itu terdapat 9 Pegawai PNP dan 4 Tenaga PJLP.

Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Sorong dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

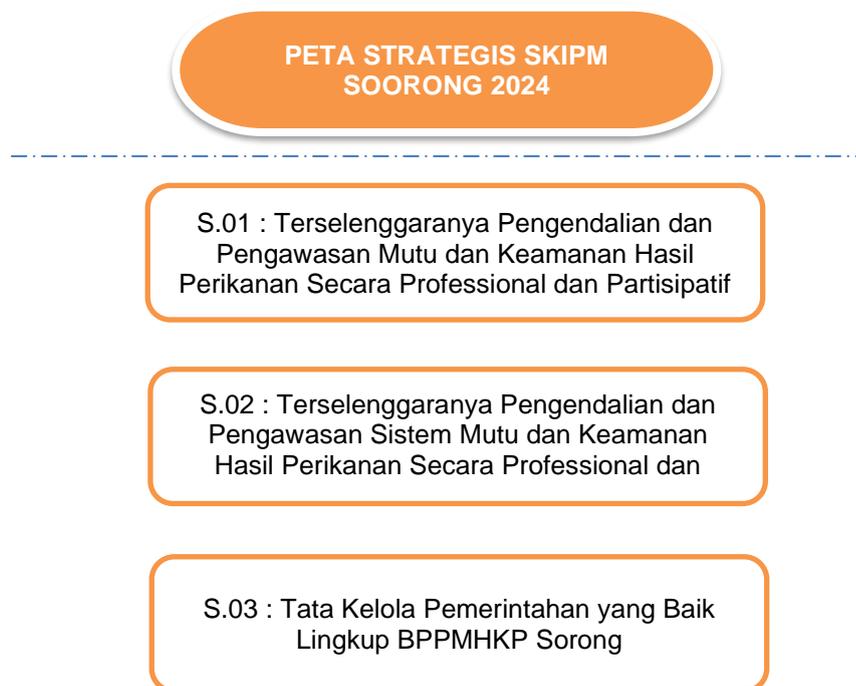


Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Sorong

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini



Gambar 1.2 Peta Strategi Stasiun KIPM Sorong Tahun 2024

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Sorong Triwulan I
Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024	TARGET TW1
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	90	90
		2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	1	1/4
		3	Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (UPI)	5	0
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Produk)	17	5

		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW1	
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK.2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (nilai)	84	84
		6	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	5	0
		7	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (unit)	15	3
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	3	0
		9	Penerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	2	0

		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW1	
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK.3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	10	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Indeks)	86	0
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	0
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	100	0
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	80
		14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	93,76	0
		15	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	0
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	0
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	0

2.1. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah a) Angka maksimum adalah 120; b) Angka minimum adalah 0.

Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) Polarisasi Minimize

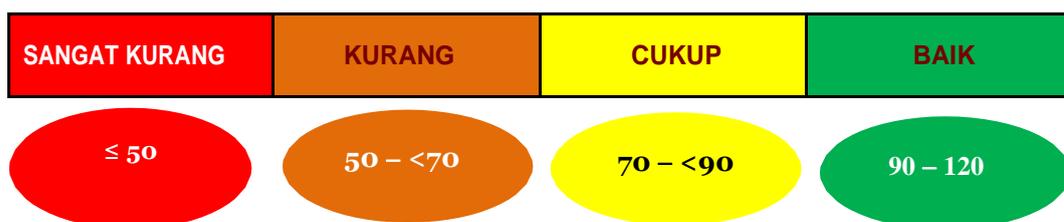
Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

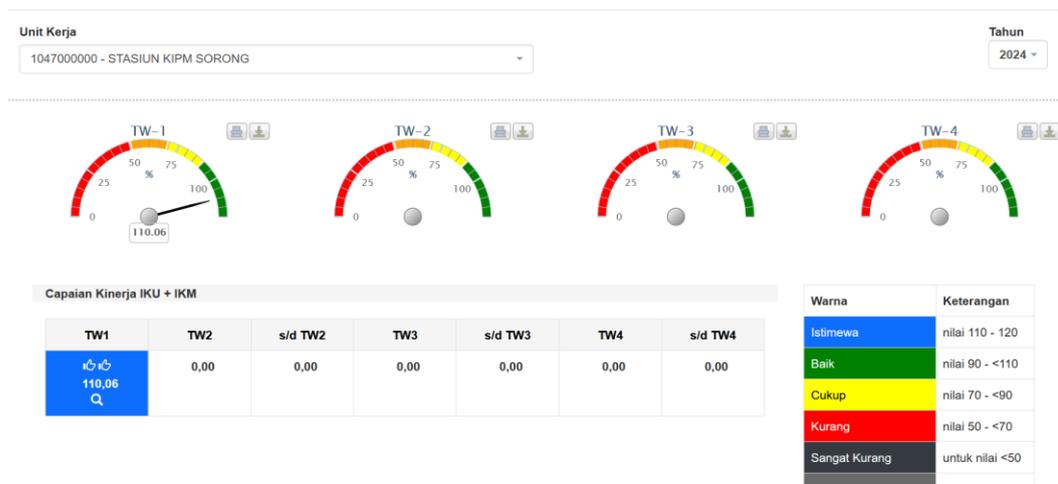
Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Status Indeks Capaian IKU

2.2. Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong pada Triwulan I sebesar 110,06% (kategori Sangat Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap kegiatan strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP



Gambar 2.2. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Startegis (NSPP) Triwulan I (satu) pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran kegiatan organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Sorong Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN I				
		TARGET	REALISASI	%		
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK1.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	90	100	100
		2	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	1/4	1/4	100
		3	Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (UPI)	0	0	-
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Produk)	5	5	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TRIWULAN 1				
		TARGET	REALISASI	%		
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK.2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (nilai)	84	90,38	107,6
		6	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	5	0	0
		7	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (unit)	15	3	100
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	3	0	0
		9	Penerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	2	0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TRIWULAN 1		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK.3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP	10	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Indeks)	86	0	0
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	0	0
		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	100	0	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	100	120
		14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	93,76	0	
		15	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	82	0	
		16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	0	
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	0	

2.3. Analisa dan Evaluasi

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detail menurut indikator kerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Stasiun KIPM Sorong sesuai Permen PAN 53 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Realisasi sasaran program Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 105,89%. Keberhasilan pencapaian sasaran program ini diperoleh dari pencapaian indikator a).Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor, b).Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI, c). Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability, d). Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk UPI.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK. 1 Rasio eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekport Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Kontribusi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Sorong dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products / KI-D1) yang diterbitkan Stasiun KIPM Sorong di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan I Tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1) yang memenuhi syarat sejumlah 205 dari total sertifikat yang diterbitkan sebanyak 205 sertifikat, sehingga capaian pada triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Sorong dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta konsistensi Stasiun KIPM Sorong dalam

pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Papua Barat dan Papua Barat Daya di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.

Rincian Jumlah Sertifikat Ekspor yang diterbitkan selama periode Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	NEGARA TUJUAN	KOMODITI	VOLUME			JUMLAH SERTIFIKAT			KETERANGAN
			jan	peb	mar	jan	peb	mar	
1	CHINA	FRESH FROZEN PRAWN	8.100	24.300	24.300	2	2	3	
		Frozen Banana Prawn Head On			8.100				1
2	JAPAN	UDANG BEKU	43.290	53.484	37.271	3	4	4	
3	MALAYSIA	FRESH GROUPE FISH	53			1			
		FRESH RED SNAPER	385			1			
4	SINGAPURA	FRESH GROUPE FISH	5.385	3.705	7.383	34	27	37	
		FRESH KING FISH (MACKEREL)	12.335	9.245	7.235	40	27	36	
5	TAIWAN	UDANG BEKU	8.100			1			
6	TIMUR LESTE	CANNED TUNA	15.552			1			
7	UNITED STATES	TUNA LOIN			16.185,77				1
TOTAL			93.200	90.734	100.475	83	60	82	

Data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan pada aplikasi Ssterkaroline

Adapun penghitungan realisasi menggunakan formula sbb :

$$IK1 = \frac{\text{Jumlah ekspor} - \text{Jumlah penolakan}}{\text{Jumlah ekspor}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekport Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	90	100	100

Tercapaiannya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Sorong pada triwulan I tahun 2024 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

IK. 2 Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Monitoring Kesegaran Ikan, Residu, Bahan Berbahaya, Racun Hayati Laut (Marine Biotoxin), dan Lingkungan Perairan bertujuan mendapatkan data dan informasi kondisi kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut (marine biotoxin), dan lingkungan perairan serta menjamin implementasi program monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati laut (marine biotoxin), dan lingkungan perairan berjalan dengan efektif.

Kegiatan Monitoring Marine Biotoxin pada Tahun 2024, di Stasiun KIPM Sorong dilakukan setiap Triwulan dengan rincian jadwal sebagai berikut :

JADWAL KEGIATAN MONITORING MARINE BIOTOXIN TA. 2024

No	Jadwal	Lokasi	Nama Petugas	Kunjungan Lapangan dan Sampling	Mengisi Permohonan BUSKI PM	Pengiriman Ke BUSKIPM	LHU	Keterangan
1	TW 1	WPP 715 (Perairan Sorong dan Raja Ampat)	Marni, Henny	Februari 2024	Februari 2024	Februari 2024	negatif	telah dilaksanakan
2	TW 2	WPP 715 (Perairan Sorong dan Raja Ampat)	Katarina, Maslina	Mei 2024	Mei 2024	Mei 2024		
3	TW 3	WPP 715 (Perairan Sorong dan Raja Ampat)	Felyanto, M. David	Agustus 2024	Agustus 2024	Agustus 2024		
4	TW 4	WPP 715 (Perairan Sorong dan Raja Ampat)	Sonya, Melki	November 2024	November 2024	November 2024		

Data dukung capaian indikator berupa Laporan Marine Biotoxin Triwulan I yang terdiri dari Data Lapangan dan Laporan Hasil Pengujian Sampel yang diterbitkan oleh Laboratorium Terakreditasi.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI dengan Monitoring kesegaran ikan, Residu Bahan Berbahaya Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	1	1	100

IK. 3 Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global. Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan.

Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Pada Triwulan I, Stasiun KIPM Sorong tidak menargetkan UPI yang akan dilakukan kegiatan verifikasi traceability, sehingga capaian indikator ini adalah 0 (nihil) UPI atau sebesar 0%. Adapun target kunjungan traceability ke UPI seperti pada tabel berikut :

**PROGRAM INSPEKSI PENERAPAN KETERTELUKURAN TRACEABILITY
TAHUN 2024**

UPT : STASIUN KIPM SORONG

No	NAMA UPI DI SORONG	JENIS PRODUK	GRADE HACCP	JADWAL SURVELEN (BULAN)												Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	BINA NELAYAN JAYA, PT	Fresh Demersal Fish	B														Aktif Ekspor
		Fresh Pelagic Fish	B														
		Frozen Demersal Fish	B														
		Frozen Pelagic Fish	C														
		Frozen Tuna	B														
2	DWI BINA UTAMA, PT	Frozen Shrimp	B								M2					Aktif Ekspor	
3	PT. CITRA RAJA AMPAT CANNING	Fresh Tuna	B													Aktif Ekspor	
		Frozen tuna'	B														
		Canned Tuna'	A														
		Frozen Cooked Tuna	A														
4	UD. PIALA	Frozen Shrimp	B							M2					Aktif Ekspor		
5	PT. BINTANG MEGAH JAYA PAPIUA	Fresh Demersal Fish	B												Aktif Ekspor		
		Fresh Pelagic Fish	B														

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja 3

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Unit penanganan dan / atau pengolahan ikan yang menerapkan system Traceability Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (UPI)	0	0	nihil

IK. 4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011. Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Ruang Lingkup produk sertifikat HACCP yang diterbitkan tahun berjalan dan jumlah Ruang Lingkup UPI yang dilakukan kegiatan Monev.

Pada Triwulan I, Stasiun KIPM Sorong menargetkan Ruang Lingkup HACCP yang dilakukan kegiatan Monev adalah sebanyak 5 Ruang Lingkup Produk.

Realisasi pada periode Triwulan I ini adalah 5 Ruang Lingkup produk yang terdapat pada 3 Unit Pengolahan Ikan, dengan rincian sbb :

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP PRODUK	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	GRADE SERTIFIKAT HACCP	TANGGAL VERIFIKASI	TIM VERIFIKATOR	HASIL VERIFIKASI (SKOR)
1	UD. PIALA	Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong, Sorong, West Papua - Indonesia	1 FROZEN SHRIMP	No. 087/PM/HACCP/PB/01/23	B	20 FEBRUARI 2024	MASLINA KATARINA RUMFABE, MOHAMMAD DAVID BRILLIAN	66
2	PT. BINTANG MEGAH JAYA PAPUA	Jl. Tanjung Perak No. 3 KM. 9,5 Kel. Sawagumu, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, West Papua - Indonesia	1 Fresh Demersal Fish	No. 090/PM/HACCP/PS/04/23	B	07 Maret 2024	Maslina, S.St.PI	31
			2 Fresh Pelagic Fish	No. 091/PM/HACCP/PS/02/23	B		Katrina Rumfabe, A.Md.PI	
			3				Wa Ode Sumarni, A.Md	
			4					
3	PT. Citra Raja Empat Canning	Jl. A. Yani Klademak I. Kel. Klaligi, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, West Papua- Indonesia	1 Fresh Tuna	No. 111/PM/HACCP/PS /03/23	B	08 Maret 2024	Maslina, S.St.PI	59
			2 Frozen Tuna	No. 112/PM/HACCP/PB /03/23	B		Katrina Rumfabe, A.Md.PI	
			3				Moh. David Brillan, A.Md.PI	
			4					

Data dukung capaian indikator berupa Laporan kegiatan Monev HACCP yang dilakukan oleh inspektur pada 3 Unit Pengolahan Ikan (UD. Piala, PT. Bintang Megah Jaya Papua dan PT. Citra Raja Ampat Canning.

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Produk)	5	5	100

Sasaran Program 2.

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif

Realisasi sasaran program Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional dan Partisipatif pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 104,29%. Keberhasilan pencapaian sasaran program ini diperoleh dari pencapaian indikator a). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, b). Penerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, c). UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control), d). Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan dan e). . Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK. 5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di UPT lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/61>. Target Indikator ini pada Tahun 2024 adalah nilai sebesar 84 yang merupakan rata-rata dari pengukuran setiap triwulan.

Triwulan 1 Tahun 2024 telah dilakukan pengukuran IKM yang melibatkan 29 responden dengan hasil nilai IKM adalah 90,38 atau 107,6 % dari target.

Data dukung capaian indikator berupa Laporan IKM Triwulan 1 yang telah dilaporkan ke Pusat SSK/Pusat MM BPPMKP

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (nilai)	84	90.38	107,6

K. 6 Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Stasiun KIPMSorong ditargetkan dapat merealisasikan sertifikasi CPIB baru sebanyak 5 (Empat) unit supplier produk perikan baik pengolahan maupun penanganan pada Tahun 2024. Sertifikasi CPIB ini penting untuk dilakukan karena ini merupakan sebuah sistem pengawasan yang dilakukan dihilu sehingga dengan adanya pengawasan yang baik dihilu yaitu dengan diterapkannya CPIB diharapkan dapat menjaga kualitas produk perikanan tersebut dengan baik sampai dengan hilir ataupun konsumen.

Masa berlaku sertifikat CPIB Suplier adalah 4 tahun, dalam rentang masa berlakunya dilakukan pengawasan setiap tahun minimal satu kali oleh UPT yang menerbitkan sertifikat tersebut.

Pada Triwulan I, Stasiun KIPM Sorong tidak menargetkan Suplier yang akan dilakukan kegiatan inspeksi, sehingga capaian indikator ini adalah 0 (nihil) atau sebesar 0%. Adapun target inspeksi suplier dalam rangka Sertifikasi CPIB seperti pada tabel berikut :

NO	TARGET SUPPLIER	Lokasi	RENCANA VERIFIKASI TAHUN 2024													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
1	SUPPLIER 1	Sorong														
2	SUPPLIER 2	Sorong														
3	SUPPLIER 3	Sorong														
4	SUPPLIER 4	Sorong														
5	SUPPLIER 5	Sorong														

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	0	0	nihil

IK. 7 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan memiliki sertifikat HACCP. Pada UPI pemegang Sertifikat HACCP dilakukan kegiatan pengendalian berupa Survailen terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP. Kunjungan Survailen dilakukan secara berkala/frekuensi yang disesuaikan dengan grade HACCP dari UPI tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator kegiatan ini, dihitung berdasarkan jumlah Surat Keterangan Survailen (SKHS) yang diterbitkan pada setiap periode .UPI yang telah dilakukan kegiatan Survailen selanjutnya melakukan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian. UPI yang memenuhi persyaratan dapat diterbitkan Surat Keterangan Survailen (SKHS) Pada Triwulan I, realisasi Surat Keterangan Survailen (SKHS) yang diterbitkan Stasiun KIPM Sorong sebanyak 3 SKHS dari target sebanyak 3 SKHS untuk UPI, dengan rincian sbb :

No.	Nama UPI	Tgl. Pelaksanaan	No. SKHS
1	PT. Bina Mega Jaya Papua	15 Januari 2024	1/35.0/SKV/02/24
2	PT. Dwi Bina Utama	12 Februari 2024	2/35.0/SKV/02/24
3	PT. Bina Nelaya Jaya	05 Maret 2024	3/35.0/SKV/03/24

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi Honest KKP

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja 7

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (unit)	3	3	100

IK. 8 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Quality Assurance adalah menjamin penerapan sistem pengendalian mutu pada proses produksi dalam rangka pemenuhan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai peraturan dan persyaratan standar pasar domestik dan internasional dengan tidak mengurangi peran dan fungsi kegiatan pengendalian mutu oleh unit kerja yang membidangi.

Formula yang digunakan untuk menghitung Indikator Kinerja ini adalah menghitung jumlah lokasi budidaya/nelayan, pelabuhan yang telah dilakukan verifikasi QA oleh UPT selaku otoritas kompeten.

Pada Triwulan I, Stasiun KIPM Sorong tidak menargetkan Lokasi yang akan dilakukan kegiatan quality assurance, sehingga capaian indikator ini adalah 0 (nihil) atau sebesar 0%.

Adapun target kegiatan Quality Assurance Tahun 2024 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan telah disusun seperti pada tabel berikut :

LOKASI	KEGIATAN / BULAN												KET	
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES		
Kampung Budidaya Nila Malaus, Kab. Sorong					Verifikasi Quality Assurance									
Kampung Budidaya Kerapu Sawandarek, Kab. Raja Ampat							Verifikasi Quality Assurance			Verifikasi Quality Assurance				
Kampung Budidaya Rumput Laut Marsi, Kaimana														
Kampung Budidaya Rumput Laut Yomber, Teluk Wondama														

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja 8

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (lokasi)	0	0	nihil

IK. 9 Penerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Sistem jaminan mutu Laboratorium di lakukan dengan Akreditasi SNI/ISO 17025:2017 dan Kegiatan Inspeksi dengan SNI/ISO 17020:2012.

Jaminan penerapan Laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi KAN dengan status Terakreditasi setelah melakukan kegiatan Surveilien maupun Kunjungan Perpanjangan Akreditasi.

Tahun 2024, Stasiun KIPM Sorong masuk jadwal Reakreditasi untuk lembaga Inspeksi SNI/ISO 17020:2012 dan Survailen Pertama untuk Laboratorium Penguji SNI/ISO 17025:2017. Sehingga target untuk Indikator Kinerja ini adalah 1 Sertifikat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan 1 Sertifikat Survailen Laboratorium Penguji.

Jadwal kunjungan Survailen Laboratorium Penguji adalah Mei-Agustus 2024, sedangkan untuk Lembaga Inspeksi adalah Februari-Agustus 2024.

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja 9

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Penerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (sertifikat)	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi KANMIS BSN

Sasaran Program 3.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP

Realisasi sasaran program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 120,00%. Keberhasilan pencapaian sasaran program ini diperoleh dari pencapaian indikator a) Penilaian Mandiri SAKIP, b). Indeks Profesionalitas ASN, c). Persentase Penyelesaian Temuan BPK, d). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja e). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), f). Nilai Kinerja Anggaran, g). Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa dan h). Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

IK. 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Perhitungan Indeks Profesional ASN dilakukan pada akhir tahun, namun dalam selang waktu tersebut juga dilakukan pengukuran pada Semester 1 dengan target 81 dan Semester 2 dengan target 86 sebagai proyeksi nilai tahunan.

Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN adalah:

$$\text{Indeks} = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan :

- A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan
- B : Persentase capaian output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

Pada ujicoba monitoring Triwulan I Indeks Profesional ASN melalui website ropeg.kkp.go.id, diperoleh nilai IP ASN Stasiun KIPM Sorong adalah **71,23**.

Angka tersebut masih jauh dari target Semester I sebesar 81, sehingga diperlukan kerjasama setiap ASN untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang menaikkan nilai IP ASN organisasi.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja 10

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi Ropeg KKP

IK. 11 Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan PermenpanRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA

Target Nilai Penilaian mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Sorong pada Tahun 2024 adalah 78, dengan periode penilaian adalah tahunan.

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja 11

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	nihil

IK. 12 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK SKIPM Sorong merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100% dengan penilaian secara tahunan.

Pada tanggal 22 – 28 Februari 2024, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Stasiun KIPM Sorong Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 , dengan jumlah temuan adalah nihil (BA tidak ada)

Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja 12

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	0	0	nihil

IK. 13 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Sorong berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh SKIPM Sorong yang menjadi objek pengawasan.

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong adalah sebagai berikut :

$$NK = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan :

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

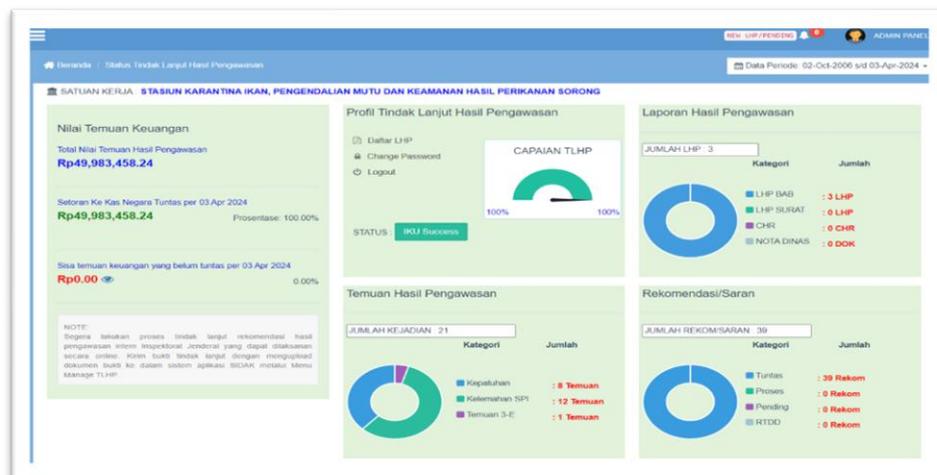
$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Pada tanggal 15 s/d 19 Januari 2024, Inspektorat Jendral KKP telah melaksanakan Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan PBJ Tahun 2023 pada Stasiun KIPM Sorong. Pada kegiatan tersebut terdapat 9 Rekomendasi dari LHP yang harus ditindaklanjuti. Pada tanggal 22 April 2024, semua rekomendasi LHP telah ditindaklanjuti pada aplikasi SIDAK. Sehingga persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Sorong. Pada Tahun 2024 telah terealisasi 100%.dari target 80%

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja 13

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	80	100	120

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi SIDAK KKP



Gambar 2.3. Dashboard Persentase Temuan Itjen KKP pada Aplikasi SIDAK KKP Tahun 2024

IK. 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA.

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 93,76. Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan) , sehingga nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II berakhir.

Pada ujicoba monitoring Triwulan I IKPA melalui website OMSPAN Kemenkeu, diperoleh nilai IKPA Stasiun KIPM Sorong adalah 88,61.

Angka tersebut masih jauh dari target Tahunan, sehingga diperlukan kerjasama Tim Keuangan untuk dapat menaikkan nilai Deviasi Hal III DIPA, Pengelolaan UP/TUP dan Capaian Output.

Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja 14

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	86.54	100.00	0.00	0.00	96.00	100.00	70.52	70.88	80%	88.61
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.65	20.00	0.00	0.00	9.60	5.00	17.63			
					Nilai Aspek	93.27		98.67			70.52					

Gambar 2.4. Dashboard IKPA Satker Stasiun KIPM Sorong untuk periode s/d Maret 2024 pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

IK. 15 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja

keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 82. Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan) , sehingga nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II berakhir.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja 15

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (Nilai)	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi Monev DJA/ Kemenkeu (SMART DJA).

IK. 16 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku. Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1) RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
- 2) Persentase pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- 3) Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
- 4) Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 85. Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan) , sehingga nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II berakhir.

RUP tahun 2024 telah diumumkan untuk seluruhnya (100 %) pada aplikasi SIRUP baik yang sifatnya pengadaan Barang/Jasa Swakelola maupun dengan Penyedia. Pengadaan melalui mekanisme SPSE tidak dilakukan untuk tahun ini, namun tetap dilakukan perekaman pada Aplikasi SPSE untuk pengadaan PL dan Swakelola.

Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja 16

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi SIRUP LKPP dan LPSE KKP .

IK. 17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (10%)
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018 - 2022 (20%)
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
- 5) Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) tepat waktu (20%)

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebesar 85. Perhitungan dilakukan untuk nilai posisi akhir (Tahunan) , sehingga nilai realisasi akan ditentukan setelah Semester II berakhir.

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja 17

Indikator Kinerja	TRIWULAN I		
	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup UPT BPPMHKP Sorong (%)	0	0	nihil

Data dukung capaian indikator ini, dapat dikonfirmasi pada Aplikasi SAKTI Modul Operatro BMN dan Persediaan .

2.4. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran SKIPM Sorong pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 4.721.053.000,- dan telah terealisasi pada triwulan 1 (Januari – Maret 2024 sebesar Rp. 968,253,140,- atau sebesar 20.51 %. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Sorong T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA								TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN		TRANSFER
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	PAGU	2,343,551,000	1,906,652,000	0	0	0	0	0	0	0	4,250,203,000
		REALISASI	565,257,816 (24.12%)	394,895,324 (20.71%)	0	0	0	0	0	0	0	960,153,140 (22.59%)
		SISA	1,778,293,184	1,511,756,676	0	0	0	0	0	0	0	3,290,049,860
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU	0	243,350,000	0	0	0	0	0	0	0	243,350,000
		REALISASI	0	8,100,000 (3.33%)	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000 (3.33%)
		SISA	0	235,250,000	0	0	0	0	0	0	0	235,250,000
3	3990 Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	PAGU	0	227,500,000	0	0	0	0	0	0	0	227,500,000
		REALISASI	0	0 (0.00%)	0	0	0	0	0	0	0	0 (0.00%)
		SISA	0	227,500,000	0	0	0	0	0	0	0	227,500,000
GRAND TOTAL		PAGU	2,343,551,000	2,377,502,000	0	0	0	0	0	0	0	4,721,053,000
GRAND TOTAL		PAGU	2,343,551,000	2,377,502,000	0	0	0	0	0	0	0	4,721,053,000
GRAND TOTAL		REALISASI	565,257,816 (24.12%)	402,995,324 (16.95%)	0 (0.00%)	968,253,140 (20.51%)						
GRAND TOTAL		SISA	1,778,293,184	1,974,506,676	0	0	0	0	0	0	0	3,752,799,860

Gambar 2.5. Dashboard Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja Satker Stasiun KIPM Sorong untuk periode s/d Maret 2024 pada Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Sorong Triwulan I Tahun 2024 sebesar 110,06% (kategori sangat baik).
- 2) Dari 17 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024, terdapat 6 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, ada 11 IKU yang belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan pada periode berikutnya, atau pada akhir tahun/semesteran.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan I Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

- 1) Dalam hal kinerja pelaksanaan anggaran agar lebih disiplin melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pelaksanaan kegiatan
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal; dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.
- 3) Indikator dalam penilaian IKPA yang masih rendah sampai dengan Triwulan I, sehingga perlu menjadi fokus dalam rangka perbaikan ke depan antara lain penyesuaian Deviasi Hal III DIPA dengan persiapan pemutakhiran RPD Hal III DIPA untuk triwulan II 2024, mengakselerasi belanja kontraktual, baik belanja modal maupun belanja barang serta memperhitungkan komponen kepatuhan dengan menyampaikan kontrak ke KPPN segera setelah kontrak ditandatangani.